

# **RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBERDAYA MANUSIA  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat, dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat dimaksudkan menjadi pegangan perencanaan dalam rangka menyusun Program, Kegiatan dan subkegiatan Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia tahun tersebut dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat.

Untuk dapat Menyusun Rancangan Awal Renja Tahun 2025 yang baik diperlukan data dan informasi yang lengkap, karena itu dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2025 ini melibatkan seluruh Pejabat dan Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat dengan diskusi yang mendalam dan terjadi komunikasi timbal balik antara pimpinan dan staf. Sehingga, tersusun keputusan-keputusan sistematis yang akhirnya menjadi dokumen Rancangan Awal Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Semoga Rancangan Awal Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk program, kegiatan dan Subkegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat. Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Liwa, 15 Januari 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumberdaya Manusia  
Kabupaten Lampung Barat,

  
**Drs. AHMAD HIKAMI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660821 198602 1 001

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Landasan Hukum .....	4
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4. Sistematika Penulisaan .....	6
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	<b>8</b>
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capain Renstra Perangkat Daerah .....	8
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	9
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	11
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	13
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	18
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>19</b>
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	19
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	19
	3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan .....	21
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>24</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>37</b>

## LAMPIRAN

1. Lampiran I Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2024
2. Lampiran II Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya pembangunan sebagai proses perubahan yang terus menerus berlangsung, merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai dalam meningkatkan kualitas hidup manusia termasuk perubahan dalam diri manusia itu sendiri, masyarakat dan lingkungannya. Pembangunan merupakan bagian dari satu kesatuan sistem pembangunan yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberhasilan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh keberhasilan didalam membangun Sumberdaya Manusia yang dilaksanakan secara menyeluruh, terarah dan terpadu sehingga kualitas Sumberdaya Manusia itu sendiri dapat diselaraskan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sektor pembangunan.

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur di Kabupaten Lampung Barat merupakan bagian integral pembangunan nasional di bidang aparatur dalam rangka menciptakan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional sebagai penyelenggara pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Usaha demikian harus terus menerus dipacu dan diupayakan secara terarah, terprogram dan berkesinambungan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia sebagai salah satu unsur pemerintah yang bertanggungjawab dalam rangka peningkatan kualitas dan profesional Aparatur Pemerintah di daerah, maka perlu untuk menyusun Program, Kegiatan dan Subkegiatan baik jangka pendek maupun jangka panjang sehingga kontribusinya bagi pembangunan bangsa terutama Sumberdaya Aparatur sesuai dengan tuntutan yang diperlukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.





Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun. RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun ketiga dari periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan mengambil masukan dari Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), karena Renja Perangkat Daerah merupakan sumber masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di atasnya yaitu RKPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun yang memuat kebijakan, Program, Kegiatan dan Subkegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat perlu menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan agar mampu berkiprah secara maksimal dalam sumbangsuhnya membina dan mengembangkan profesionalisme serta karier Pegawai Negeri Sipil dalam upaya penciptaan pelayanan pengelolaan kepegawaian yang akurat, mudah, cepat dan tuntas mengarah pada perwujudan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Rencana Pembangunan ini



merupakan pegangan umum pelaksanaan teknis operasional di jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat yang diformulasikan dalam bentuk program aksi atau kegiatan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi dan pelaksanaannya terkoordinasi dengan menyesuaikan kemampuan dana yang tersedia dan kondisi yang ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah yang akan dijadikan acuan bagi organisasi dalam upaya penyesuaian, keserasian, kesinambungan dan keterpaduan pengelolaan urusan Kepegawaian di Kabupaten Lampung Barat. Renja-Perangkat Daerah inilah yang nantinya diturunkan dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah hingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk mengantisipasi adanya perbedaan dalam peraturan dan perundangan perencanaan dan penganggaran daerah terutama tentang belum adanya payung hukum yang terpadu antara perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran, maka sangat perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah.





## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2025 Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana





Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kerja;
13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2025 Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen resmi Perencanaan Daerah yang dipersyaratkan guna mengarahkan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat khususnya dan pembangunan tahunan pada umumnya.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra, karena Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2025 Badan



Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat berkaitan erat dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program, kegiatan dan subkegiatan.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasiikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sistematika penulisan Renja PERANGKAT DAERAH sebagai berikut :

- Bab I : Bab Pertama berisikan Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja-Perangkat Daerah serta Sistematika penulisan.
- Bab II : Bab Kedua berisikan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu yang memuat evaluasi pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan



Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat.

Bab III : Bab Ketiga berisikan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Subkegiatan.

Bab IV : Bab Keempat berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Bab Kelima adalah penutup

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II





## BAB II

# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin setelah Pergeseran Anggaran sebanyak 2 program, jumlah kegiatan sebanyak 10 kegiatan dan jumlah subkegiatan sebanyak 38 subkegiatan. Alokasi dana tahun 2023 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 4.416.019.800,- terealisasi sebesar Rp. 4.317.302.915,- atau 97,76 persen.

Dari seluruh Sub kegiatan terdapat sebanyak 3 Sub kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100 persen yaitu :

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN realisasi\* fisik/output sebesar 96,25 persen. Realisasi fisik/output mencapai 100 persen karena Dari target Sub Kegiatan 160 Dokumen terealisasi 154 Dokumen dari Target CPNS 151 Dokumen terealisasi 151 Dokumen CPNS yang ikut Latsar dan Diklatpim II dari target 2 Dokumen terealisasi 3 Dokumen
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat realisasi\* fisik/output sebesar 40 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Dari target Sub Kegiatan 10 Dokumen terealisasi sebanyak 4 Dokumen Karena terjadinya pengurangan anggaran.



3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur realisasi\* fisik/output sebesar 50 persen. Realisasi fisik/output belum mencapai 100 persen karena Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target 4 Dokumen hanya terealisasi hanya 2 Dokumen terdiri dari Evaluasi Masa Jabatan 5 Tahun JPTP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat sesuai PP 11 Tahun 2017 dan Seleksi terbuka JPTP Kepala Dinas Perhubungan dikarenakan Pejabat JPTP sebelumnya memasuki Batas Usia Pensiun

Rata-rata capaian indikator keluaran pada tahun 2023 adalah sebesar 97,63 Persen.

## 2.2. ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat yang telah dilaksanakan berjalan sesuai prosedur seperti meningkatkan pola karir PNS yang terarah, pemenuhan hak-hak





pegawai, penyediaan aparatur yang mampu memberikan pelayanan secara objektif, dan terlaksananya up dating data secara berkesinambungan dan secara umum telah tercapai sesuai target kinerja.

Dari hasil pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengukur sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023, terlebih dahulu dijelaskan bahwa selain Indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar atau tolok ukur capaian hasil kinerja, evaluasi kinerja juga menggunakan metode kuantitatif berdasarkan data pilihan dari tiap indikator yang relevan dalam mencapai sasaran. Indikator kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel**  
**Tujuan dan Sasaran Renja**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target
					2023
1.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	78,75 Nilai Sakip
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelaksanaan Profesionalitas ASN Berdasarkan Kompetensi	60 %
				Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	49 %

Namun dalam pelaksanaan pencapaian kinerja masih terdapat hambatan dalam pengelolaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) baik dari





sumber daya manusia dan perangkat pendukungnya karena hal ini sangat penting sekali dalam peningkatan pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi dan juga sarana pendukung pelaksanaan pendidikan dan latihan seperti gedung dan asrama.

Sedangkan untuk merealisasikan Program, Kegiatan dan Subkegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra, Renja selalu mendapat dukungan anggaran dari APBD meskipun tidak semuanya terealisasi.

### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, dengan tugas utama dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah adalah mengelola secara umum masalah-masalah Kepegawaian baik tentang Pembinaan, Pengembangan dan Mutasi pegawai.

Ada beberapa hal yang menjadi issue-issue strategis pada saat ini di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya tingkat disiplin ASN
- b. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan
- c. Masih rendahnya komitmen Aparatur terhadap peningkatan kompetensi baik formal maupun non formal
- d. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung terlaksananya pendidikan dan pelatihan
- e. Penempatan PNS dalam jabatan belum sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan



- f. Belum terpenuhinya jumlah formasi kebutuhan ASN sesuai dengan Anjab dan ABK

Dalam melaksanakan tujuan sebagai upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Lampung Barat mencapai misi terdapat ancaman sesuai dengan identifikasinya sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat tantangan baik dari lingkungan internal maupun eksternal yaitu sebagai berikut :

Di lingkungan Internal yang menjadi tantangan yang terjadi umumnya adalah sebuah kelemahan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan oleh Pegawai.
2. Belum optimalnya koordinasi antara bidang yang ada.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan Pegawai.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar terutama gedung dan asrama diklat.
5. Orientasi pada jabatan struktural tanpa kompetensi.
6. Pengiriman tugas belajar yang tidak sesuai Kebutuhan organisasi.
7. Belum berjalannya ABK dalam menentukan Kebutuhan Pegawai.

Sedangkan lingkungan eksternal organisasi dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan adalah :

1. Kurang Optimal Pengelolaan Manajemen Kepegawaian.
2. Penempatan dan Pengembangan, peningkatan karir yang tidak sesuai kompetensi.
3. Tuntutan Masyarakat dan aparatur akan transparansi pelayanan.
4. Tuntutan Pelayanan Publik yang cepat, baik dan profesional.
5. Adanya tuntutan reformasi birokrasi untuk kinerja aparatur.



Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat adanya Peluang yang dimiliki dalam mencapai tujuan sesuai dengan identifikasinya adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai Kepegawaian.
2. Adanya Diklat Struktural, Fungsional dan Beasiswa Pendidikan Formal melalui Tugas Belajar untuk Pengembangan dan Peningkatan SDM.
3. Adanya kesempatan untuk meningkatkan jenjang karier Pegawai.
4. Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah.
5. Adanya Rekrutmen PNS.
6. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan bawahan (Staf).

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan pada Tahun 2023 sebagai berikut : Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat merencanakan Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukung prioritas tersebut.

Sesuai dengan Rancangan awal RKPD Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat melaksanakan 2 (Dua) Program 10 Kegiatan yang didukung dengan 38 (tiga puluh delapan) subkegiatan dengan rincian sebagai berikut :





NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDOKATOR	TARGET
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan



3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan
4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
<b>c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen
<b>d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
<b>e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan





3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
<b>f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Kendaraan
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit
<b>II. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			
<b>g. Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>			
1.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen
2.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	103 Dokumen
3.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen
4.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 Dokumen
5.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Laporan
<b>h. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>			
1.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen
2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen





<b>i. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>			
1.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	160 Dokumen
2.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang
3.	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	10 Dokumen
<b>j. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			
1.	Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen
2.	Evaluasi Hasil Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen
3.	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	196 Orang
4.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	131 Orang
5.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan



## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN MASYARAKAT

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi dan perguruan tinggi.

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Ket
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	



## **BAB III**

# **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan. Dengan sasarannya semakin kuatnya kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, sehingga pada prioritas pembangunan target kinerja yang diharapkan adalah terwujudnya rasio jumlah Pegawai Negeri Sipil terhadap jumlah penduduk 1:30 untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dimaksud.

Sesuai dengan tupoksi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM terhadap Kebijakan Nasional dilakukan melalui kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kinerja (PPPK). Institut Dengan ketersediaan aparatur yang berkualitas dan profesional yang ada di daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Tujuan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD), yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu 4 (Empat) Tahun ke depan dari Tahun 2023 s/d 2026.





Namun tujuan Rencana Kerja lebih mengarah pada periode 1 (Satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun 2025 Adalah: ***“Terwujudnya Profesionalitas ASN”***.

Sasaran yang ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi (PD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Adalah: ***“Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur”***.

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-			
			2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas Aparatur	52	55	57	60



**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-			
				2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan	Meningkatnya Kualitas Aparatur ASN	Indeks Profesionalitas ASN	52	55	57	60

### 3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Program merupakan penterjemahan daripada RPD Kabupaten yang terbagi habis sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ada di Kabupaten Lampung Barat, sehingga dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu sektor Pengembangan dan Peningkatan Sumberdaya Aparatur sangat berperan besar dalam menciptakan aparatur yang berkualitas dan profesional.

Untuk menjembatani agar RPD Kabupaten dapat tercapai, maka perlu merencanakan program yang terjabarkan dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Kepegawaian Daerah



Dalam mendukung program yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pemendagri 050-5889 tahun 2021 yaitu sebagai berikut yaitu :

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
a.	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b.	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
c.	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
d.	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e.	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
1.	Pengadaan Mebel
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
f.	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor





<b>g.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>II.</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>
<b>a.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>
1.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
2.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
3.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
4.	Pengelolaan Data Kepegawaian
5.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
<b>b.</b>	<b>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>
1.	Pengelolaan Mutasi ASN
2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
<b>c.</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>
1.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
2.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
3.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
4.	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
5.	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
<b>d.</b>	<b>Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>
1.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
3.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
4.	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
5.	Pembinaan Disiplin ASN
6.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN



## BAB IV

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus didukung misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (planning), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan.

Untuk mewujudkan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat melakukan verifikasi dengan dibentuknya Tim Anggaran yang bertugas meneliti dan memeriksa semua Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Berikut Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDOKATOR	TARGET
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen



2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan
<b>b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan





4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
<b>c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang
<b>d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
<b>e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
1.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	6 Unit
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	19 Unit
<b>f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan



2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
<b>g.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
1.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Kendaraan
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit
3.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Gedung
<b>II.</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		
<b>g.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>		
1.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen
2.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen
3.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen
4.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen
5.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Laporan
<b>h.</b>	<b>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>		
1.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	5 Dokumen



		Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	
2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen
i.	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>		
1.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang
2.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	30 Dokumen
3..	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang
4.	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	8 Dokumen
5.	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen
j.	<b>Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>		
1.	Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
2.	Evaluasi Hasil Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6 Orang
3.	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	196 Orang
4.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	296 Orang
5.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan





KODE		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Khusus Subkegiatan Tahun 2025
1		2	3
5	03	UNSUBUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN	
5	03	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
5	03	01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
5	03	01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 11 Dokumen terdiri dari : Renja, Perubahan Renja, Renstra, PPAS, Perubahan PPAS, Rencana Aksi Perubahan Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, Perubahan Perjanjian Kinerja, Cascading, dan Perubahan Cascading
5	03	01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sebanyak 1 Dokumen
5	03	01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Perangkat Daerah Sebanyak 1 Dokumen
5	03	01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan DPA-Perangkat Daerah Sebanyak 1 Dokumen
5	03	01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-Perangkat Daerah Sebanyak 1 Dokumen



5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Sebanyak 1 Laporan
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sebanyak 6 Laporan terdiri dari LKPJ, Lkip, Evaluasi Renja, Laporan Akhir Tahun, LPPD, dan Rencana Aksi
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 14 Bulan dari Bulan Januari s.d Desember serta Gaji 13 dan 14
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah sebanyak 1 Laporan
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD sebanyak 2 Laporan
5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 Dokumen
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
5	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dilaksanakan dalam lampung barat sebanyak 4 Dokumen
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pegawai yang dilaksanakan diluar Kabupaten Lampung Barat sebanyak 6 Orang



<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
5	03	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sebanyak 1 Paket yang Disediakan
5	03	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 3 Paket yang Disediakan
5	03	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 Paket yang Disediakan
5	03	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 4 SKHU yang Disediakan setiap bulannya
5	03	01	2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 1 Laporan Kunjungan Tamu
5	03	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 Bulan/Laporan pelaksanaannya
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
5	03	01	2.07	Pengadaan Mebel	Paket Mebel Yang disediakan sebanyak 6 Unit
5	03	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang disediakan sebanyak 19 Unit





5	03	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 1 Laporan terdiri dari Surat Masuk dan Surat Keluar
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Sebanyak 36 Laporan terdiri dari 12 Laporan Rekening Air, 12 Laporan Rekening Telpon dan 12 Laporan Rekening Listrik
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 12 Laporan yang Disediakan yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
5	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas sebanyak 7 Kendaraan terdiri dari 2 Unit Mobil dinas dan 5 Unit Motor Dinas
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 6 Unit terdiri dari 4 unit Komputer PC, 1 Unit Genset dan 1 Unit Printer
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 Unit bangunan



5 03 02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK sebanyak 3 Dokumen	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebanyak 1 Dokumen Pegawai yang telah masuk purna bakti
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian sebanyak 2 Dokumen
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian terdapat 2 Dokumen atau 2 Kali Usulan Pemberkasan Karis, Karsu dan Karpeg
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian terdapat 2 Laporan
5	03	02	2.02		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN sebanyak 5 Dokumen sesuai dengan Kebutuhan dan Kebijakan Pimpinan
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sebanyak 1 Dokumen yang dilaksanakan pada Tahun 2025



5 03		2.03		Pembangunan Kompetensi ASN	
5	03	02	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN berjumlah 40 Orang peserta yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat
5	03	02	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN berjumlah 30 Dokumen yang akan mengikuti Diklat, Bekerjasama dengan BPSDM Propinsi Lampung
5	03	02	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Sebanyak 100 yang Akan Mengikuti Ujian Dinas / Penyesuaian yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat
5	03	02	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat sebanyak 8 Dokumen yang akan dikirim Diklat Teknis Tainnya bekerjasama dengan Pihak-pihak terkait
5	03	02	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN sebanyak 1 Dokumen yang akan dilaksanakan bekerjasama dengan Pihak-pihak terkait
5	03	02	2.04	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	
5	03	02	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dilaksanakan sebanyak 1 Dokumen yang dilaksanakan di Kab. Lampung Barat dan Luar Kabupaten Lampung Barat
5	03	02	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebanyak 2 Dokumen yang terverifikasi dalam aplikasi SAPK BKN





5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berjumlah 6 ASN yang Diberikan Penghargaan atas Hasil Penilaian oleh Tim Penilai
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai sebanyak 196 PNS yang Diberikan Tanda Jasanya yang telah memenuhi Masa Kerja / Masa Pengabdian selama X, XX dan XXX Tahun yang diusulkan pada Aplikasi SiOLA Kementerian Dalam Negeri
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN sebanyak 296 Wajib Laporkan LHKPN
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Dilaksanakan sebanyak 5 Laporan / kali Pelaksanaan Rapat BAPEG dalam Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN



Seluruh Program/Kegiatan dan Subkegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat sumber pendanaannya dari APBD Kabupaten Lampung Barat.

Lebih lengkap mengenai rumusan rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026, dapat dilihat pada lampiran Tabel II.



## BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (Satu) Tahun, memuat Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (Indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2025 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat (Pegawai Negeri Sipil) sesuai kesepakatan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahunan.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia untuk 2025.





Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2025 merupakan penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**Drs. AHMAD HIKAMI**  
Perbina Utama Muda  
NIP. 19660821 198602 1 001



# LAMPIRAN

LAMPIRAN I  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2024  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

No	Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Suilegiatan (output)	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
5	03	KEPEGAWAIAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKPSDM	78,80 %	26.614.169.269 12.174.362.287	4.317.302.915 2.457.894.765	77,81 %	3.991.434.200 2.697.319.600	78,77 %	3.991.434.200 2.697.319.600	100%	100%	8.308.737.115 5.151.214.365	99,96%	42,34%	31,22%	BKPSDM	13	
5	03	PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	20 Laporan	46.835.800	10.895.800	5 Laporan	10.896.000	5 Laporan	10.896.000	100%	100%	21.791.800	50,00%	46,53%	BKPSDM			
5	03	001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44 Dokumen	14.426.000	2.775.000	11 Dokumen	2.775.000	11 Dokumen	2.775.000	100%	100%	5.550.000	50,00%	38,47%				
5	03	001 2.01 001	Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah	24 Laporan	8.332.000	5.000.000	6 Laporan	4.999.800	6 Laporan	4.999.800	100%	100%	9.999.800	50,00%	120,02%				
5	03	001 2.01 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	44 Dokumen	14.426.000	2.775.000	11 Dokumen	2.775.000	11 Dokumen	2.775.000	100%	100%	5.550.000	50,00%	38,47%	BKPSDM			
5	03	001 2.01 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	4 Dokumen	11.628.800	2.705.800	1 Dokumen	2.705.000	1 Dokumen	2.705.000	100%	100%	5.411.800	50,00%	46,54%	BKPSDM			
5	03	001 2.01 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4 Dokumen	11.624.000	2.705.000	1 Dokumen	2.705.000	1 Dokumen	2.705.000	100%	100%	5.410.000	50,00%	46,54%	BKPSDM			
5	03	001 2.01 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4 Dokumen	9.109.000	2.164.000	1 Dokumen	2.166.000	1 Dokumen	2.166.000	100%	100%	4.330.000	50,00%	47,54%	BKPSDM			



5	03	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan SKPD dan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	9.833.000	1 Dokumen	2.320.000	1 Dokumen	2.320.000	100%	100%	2.320.000	100%	100%	4.640.000	50,00%	47,19%	BKPSDM	
5	03	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.641.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	100%	100%	1.000.000	100%	100%	2.000.000	50,00%	43,09%	BKPSDM	
5	03	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	8.332.000	6 Laporan	5.000.000	6 Laporan	4.999.800	4.999.800	100%	100%	4.999.800	100%	100%	9.999.800	50,00%	120,02%	BKPSDM
5	03	001	2.02	001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	9.282.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	100%	100%	2.000.000	100%	100%	4.000.000	50,00%	43,09%	BKPSDM
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	12.066.000	1 Laporan	2.600.000	1 Laporan	2.600.000	2.600.000	100%	100%	2.600.000	100%	100%	5.200.000	50,00%	43,10%	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	8 Laporan	4.641.000	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	1.000.000	1.000.000	100%	100%	1.000.000	100%	100%	2.000.000	50,00%	43,09%	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bulan	9.624.534.487	14 Orang/Bulan	2.206.220.393	14 Orang/Bulan	2.301.975.200	2.301.975.200	100%	100%	2.301.975.200	100%	100%	4.508.195.593	50,00%	46,84%	BKPSDM
5	03	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bulan	9.624.534.487	14 Orang/Bulan	2.206.220.393	14 Orang/Bulan	2.301.975.200	2.301.975.200	100%	100%	2.301.975.200	100%	100%	4.508.195.593	50,00%	46,84%	BKPSDM
5	03	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	12.066.000	1 Laporan	2.600.000	1 Laporan	2.600.000	2.600.000	100%	100%	2.600.000	100%	100%	5.200.000	50,00%	43,10%	BKPSDM

5	03	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	4.641.000	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	1.000.000	100%	100%	2.000.000	50,00%	43,09%	BKPSDM
5	03	001	2.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	9.282.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	100%	100%	4.000.000	50,00%	43,09%	BKPSDM
5	03	001	2.05	001	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 Dokumen	11.460.000	4 Dokumen	2.865.000	4 Dokumen	2.865.000	100%	100%	5.730.000	50,00%	50,00%	BKPSDM
5	03	001	2.05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	110.000.000	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	100%	100%	0 Orang	0,00%	0,00%	BKPSDM
5	03	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 Dokumen	11.460.000	4 Dokumen	2.865.000	4 Dokumen	2.865.000	100%	100%	5.730.000	50,00%	50,00%	BKPSDM
5	03	001	2.06	001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	18.377.000	4 Dokumen	3.960.000	4 Dokumen	3.960.000	100%	100%	7.920.000	50,00%	43,10%	BKPSDM
						Jumlah Laporan Fasilitas	48 Laporan	31.245.000	12 Laporan	6.543.000	12 Laporan	6.543.000	100%	100%	13.276.000	50,00%	42,49%	
						Kunjungan Tamu	4 Paket	86.150.000	1 Paket	15.294.000	1 Paket	15.294.000	100%	100%	28.857.500	50,00%	33,50%	
						Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	4 Paket	11.606.000	1 Paket	2.501.000	1 Paket	2.501.000	100%	100%	5.002.000	50,00%	43,10%	
						Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	157.319.000	3 Paket	1.000.000	1 Paket	17.000.000	100%	100%	18.000.000	33,33%	11,44%	
						Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Laporan	776.632.000	12 Laporan	74.228.624	12 Laporan	182.123.000	100%	100%	256.351.624	50,00%	33,01%	
5	03	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.606.000	1 Paket	2.501.000	1 Paket	2.501.000	100%	100%	5.002.000	50,00%	43,10%	BKPSDM



5	03	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	157.319.000	3 Paket	1.000.000	1 Paket	17.000.000	100%	100%	17.000.000	33,33%	11,44%	BKPSDM
5	03	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	86.150.000	1 Paket	13.563.500	1 Paket	15.294.000	100%	100%	15.294.000	50,00%	33,50%	BKPSDM
5	03	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	16 Dokumen	18.377.000	4 Dokumen	3.960.000	4 Dokumen	3.960.000	100%	100%	3.960.000	50,00%	43,10%	BKPSDM
5	03	001	2.06	008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan	31.245.000	12 Laporan	6.543.000	12 Laporan	6.543.000	100%	100%	6.543.000	50,00%	42,49%	BKPSDM
5	03	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	776.632.000	12 Laporan	74.228.624	12 Laporan	182.123.000	100%	100%	182.123.000	50,00%	33,01%	BKPSDM
5	03	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144 Laporan	70.978.000	36 Laporan	27.350.473	36 Laporan	30.695.000	100%	100%	30.695.000	50,00%	81,78%	BKPSDM
5	03	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	527.781.200	12 Laporan	33.687.600	12 Laporan	28.762.600	100%	100%	28.762.600	50,00%	11,83%	BKPSDM
5	03	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	14.082.800	1 Laporan	2.786.000	1 Laporan	3.040.000	100%	100%	3.040.000	50,00%	41,37%	BKPSDM
5	03	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	70.978.000	36 Laporan	27.350.473	36 Laporan	30.695.000	100%	100%	30.695.000	50,00%	81,78%	BKPSDM
5	03	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	527.781.200	12 Laporan	33.687.600	12 Laporan	28.762.600	100%	100%	28.762.600	50,00%	11,83%	BKPSDM
5	03	001	2.09	001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	59 Unit	638.614.000	13 Unit	58.728.375	14 Unit	78.290.000	100%	100%	137.018.375	45,76%	21,46%	BKPSDM
5	03	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28 Unit	455.739.000	7 Unit	48.568.375	7 Unit	44.150.000	100%	100%	92.718.375	50,00%	20,34%	BKPSDM
5	03	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	47.430.000	6 Unit	10.160.000	6 Unit	10.160.000	100%	100%	20.320.000	42,86%	42,84%	BKPSDM
5	03	001	2.09	009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	135.445.000	- Unit	-	1 Unit	23.980.000	100%	100%	23.980.000	33,33%	17,70%	BKPSDM



5	03	002		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Profesionalitas ASN Berdasarkan Kompetensi	67 %	1.859.408.150	63 %	1.294.114.600	100%	100%	63 %	3.153.522.750	94,03%	21,84%	BKPSDM
					Peningkatan Kompetensi ASN	56 %		51 %		100%		51 %		91,07%		BKPSDM
5	03	002	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawalan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawalan	551 Dokumen	87.515.000	127 Dokumen	94.509.000	100%	100%	243 Dokumen	182.024.000	44,10%	31,88%	BKPSDM
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawalan	8 Dokumen	25.348.000	2 Dokumen	33.711.000	100%	100%	6 Dokumen	59.059.000	75,00%	33,73%	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	16 Dokumen	47.369.000	4 Dokumen	22.660.000	100%	100%	4 Dokumen	70.029.000	90,00%	18,19%	
					Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	8 Dokumen	331.828.000	2 Dokumen	67.909.000	100%	100%	4 Dokumen	215.180.000	90,00%	64,85%	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawalan	16 Laporan	29.548.500	4 Laporan	33.962.500	100%	100%	8 Laporan	63.511.000	90,00%	8,51%	
5	03	002	2.01	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	8 Dokumen	147.271.000	2 Dokumen	67.909.000	100%	100%	2 Dokumen	215.180.000	50,00%	64,85%	BKPSDM
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	551 Dokumen	87.515.000	127 Dokumen	94.509.000	100%	100%	243 Dokumen	182.024.000	44,10%	31,88%	BKPSDM
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	16 Dokumen	47.369.000	4 Dokumen	22.660.000	100%	100%	4 Dokumen	70.029.000	50,00%	18,19%	BKPSDM
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawalan	8 Dokumen	25.348.000	2 Dokumen	33.711.000	100%	100%	6 Dokumen	59.059.000	75,00%	33,73%	BKPSDM
5	03	002	2.01	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawalan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawalan	16 Laporan	29.548.500	4 Laporan	33.962.500	100%	100%	8 Laporan	63.511.000	50,00%	8,51%	BKPSDM
5	03	002	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	20 Dokumen	18.367.500	4 Dokumen	71.821.600	100%	100%	8 Dokumen	90.189.100	40,00%	83,78%	BKPSDM
					Jumlah Pengelolaan Kenalkan Penglat ASN	945 Dokumen	344.371.500	2 Dokumen	95.664.000	100%	100%	4 Dokumen	155.504.500	0,43%	45,16%	

5	03	002	2.02	001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	20 Dokumen	107.648.100	4 Dokumen	18.367.500	4 Dokumen	71.821.600	4 Dokumen	71.821.600	100%	100%	8 Dokumen	90.189.100	40,00%	83,78%	BKPSDM
5	03	002	2.02	002	Pengelolaan Kenalangan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenalangan Pangkat ASN	945 Dokumen	344.371.500	2 Dokumen	59.840.500	2 Dokumen	95.664.000	2 Dokumen	95.664.000	100%	100%	4 Dokumen	155.504.500	0,42%	45,16%	BKPSDM
5	03	002	2.03	001	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	403 Orang	827.017.982	168 Orang	84.188.400	160 Orang	105.840.600	160 Orang	105.840.600	100%	100%	328 Orang	190.029.000	81,39%	22,98%	BKPSDM
						Jumlah ASN yang Meningkat	420 Orang	1.465.746.000	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	100%	100%	- Orang	-	0,00%	0,00%	
						Kapasitasnya	40 Dokumen	829.356.000	4 Dokumen	80.370.650	- Dokumen	-	- Dokumen	-	100%	100%	4 Dokumen	80.370.650	10,00%	9,69%	
						Jumlah ASN yang Diklat	727 Dokumen	6.056.735.000	154 Dokumen	970.337.200	2 Dokumen	291.905.400	2 Dokumen	291.905.400	0%	100%	156 Dokumen	1.262.242.600	21,46%	20,84%	
						Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	- Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	94.229.000	1 Dokumen	94.229.000	100%	100%	1 Dokumen	94.229.000	100,00%	100,00%	
5	03	002	2.03	002	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	420 Orang	1.465.746.000	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	100%	100%	0 Orang	-	0,00%	0,00%	BKPSDM
5	03	002	2.03	003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	727 Dokumen	6.056.735.000	154 Dokumen	970.337.200	2 Dokumen	291.905.400	2 Dokumen	291.905.400	100%	100%	156 Dokumen	1.262.242.600	21,46%	20,84%	BKPSDM
5	03	002	2.03	004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	403 Orang	827.017.982	168 Orang	84.188.400	160 Orang	105.840.600	160 Orang	105.840.600	100%	100%	328 Orang	190.029.000	81,39%	22,98%	BKPSDM
5	03	002	2.03	005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	40 Dokumen	829.356.000	4 Dokumen	80.370.650	- Dokumen	-	- Dokumen	-	100%	100%	4 Dokumen	80.370.650	10,00%	9,69%	BKPSDM
5	03	002	2.03	012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	0 Dokumen	0	- Dokumen	-	1 Dokumen	94.229.000	1 Dokumen	94.229.000	100%	100%	1 Dokumen	94.229.000	0,00%	0,00%	BKPSDM
5	03	002	2.04	001	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	24 Orang	58.195.000	- Orang	-	6 Orang	1.930.000	6 Orang	1.930.000	100%	100%	6 Orang	1.930.000	25,00%	3,32%	BKPSDM
						Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1.008 Orang	76.633.000	196 Orang	14.795.000	196 Orang	23.134.000	196 Orang	23.134.000	100%	100%	392 Orang	37.929.000	38,89%	49,49%	
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan	1.171 Orang	947.861.000	136 Orang	130.072.000	296 Orang	67.762.000	296 Orang	67.762.000	100%	100%	432 Orang	197.834.000	36,89%	20,87%	
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8 Dokumen	215.205.000	2 Dokumen	47.641.800	2 Dokumen	54.665.000	2 Dokumen	54.665.000	100%	100%	4 Dokumen	102.306.800	50,00%	47,54%	



5	03	002	2.04	002	2.04	002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	16 Dokumen	1.242.991.000	2 Dokumen	104.269.200	1 Dokumen	198.559.000	1 Dokumen	198.559.000	100%	100%	3	Dokumen	302.828.200	18,75%	24,36%	
								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelidikan Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	58.733.900	5 Laporan	12.474.400	5 Laporan	35.852.500	5 Laporan	35.852.500	100%	100%	10	Laporan	48.326.900	50,00%	82,28%	BKPSDM
5	03	002	2.04	003	2.04	003	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	16 Dokumen	1.242.991.000	2 Dokumen	104.269.200	1 Dokumen	198.559.000	1 Dokumen	198.559.000	100%	100%	3	Dokumen	302.828.200	18,75%	24,36%	BKPSDM
								Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8 Dokumen	215.205.000	2 Dokumen	47.641.800	2 Dokumen	54.665.000	2 Dokumen	54.665.000	100%	100%	4	Dokumen	102.306.800	50,00%	47,54%	BKPSDM
5	03	002	2.04	004	2.04	004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	24 Orang	58.193.000	Orang	-	6 Orang	1.930.000	6 Orang	1.930.000	100%	100%	6	Orang	1.930.000	25,00%	3,32%	BKPSDM
5	03	002	2.04	005	2.04	005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1008 Orang	76.633.000	196 Orang	14.795.000	196 Orang	23.134.000	196 Orang	23.134.000	100%	100%	392	Orang	37.929.000	38,89%	49,49%	BKPSDM
5	03	002	2.04	007	2.04	007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan	1171 Orang	947.861.000	136 Orang	130.072.000	296 Orang	67.762.000	296 Orang	67.762.000	100%	100%	432	Orang	197.834.000	36,89%	20,87%	BKPSDM
5	03	002	2.04	008	2.04	008	Pengelolaan Penyelidikan Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelidikan Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	58.733.900	5 Laporan	12.474.400	5 Laporan	35.852.500	5 Laporan	35.852.500	100%	100%	10	Laporan	48.326.900	50,00%	82,28%	BKPSDM
<b>JUMLAH</b>										<b>26.614.169.269</b>		<b>4.317.302.915</b>		<b>3.991.434.200</b>		<b>3.991.434.200</b>					<b>8.306.737.115</b>		<b>31,22%</b>	











NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5	6	7	6 Orang	5.152.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kell/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.04.0005		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai				196 Orang	23.134.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kell/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Aparatur		20.128.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.04.0007		Pembinaan Disiplin ASN				296 Orang	24.691.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kell/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Aparatur		302.331.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.04.0008		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				5 Laporan	35.852.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kell/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Aparatur		16.160.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
2		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKPSDM</b>	<b>78,75 %</b>			<b>78,75 %</b>	<b>3.012.961.965,00</b>						<b>78,75 %</b>	<b>3.523.109.776,00</b>	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disodolkan				1 Paket	243.899.000,00					Aparatur		298.716.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
			Jumlah Dokumen Bahan Pakaian dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disiapkan				4 Dokumen									
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan									
			Jumlah Paket Persebaran dan Pengungkapan Kantor yang Disiapkan				1 Paket									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan				12 Laporan									
			Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	182.123.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kell/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Aparatur		194.156.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM









NO	KODE	URISAN / BIDANG URISAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	2		Jumlah Orang yang Menerima Gaii dan Tunjangan ASN	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							14 Orang/bulan	2.301.975.200,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4	Aparatur		2.775.763.976,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.800.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4	Aparatur		3.460.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4	Aparatur		1.331.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4	Aparatur		2.662.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
			Administrasi Kepegawain Perangat Daerah				4 Dokumen 6 Orang	32.865.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4	Aparatur		32.865.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	2.865.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4	Aparatur		2.865.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				6 Orang	30.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4	Aparatur		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Paket Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Rapor, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							1 Paket 4 Dokumen 12 Laporan 1 Paket 12 Laporan	243.899.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4	Aparatur			298.716.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	2.501.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4	Aparatur		3.328.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
			Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor				1 Paket	33.478.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4	Aparatur		42.192.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1 Paket	15.294.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4	Aparatur		25.039.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4 Dokumen	3.960.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4	Aparatur		25.039.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
			Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	6.543.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4	Aparatur		8.960.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
			<b>J U M L A H</b>					<b>6.237.644.365,00</b>							<b>9.632.713.066,00</b>		



Tabel Sumberdana Persubkegiatan pada Renja Tahun 2025 dan Checklist Dukungan Subkegiatan Terhadap Program Prioritas Kabupaten dan Nasional Tahun 2025

No	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Sumberdana					Dukungan Subkegiatan Terhadap Program Prioritas Kabupaten			
		DAK Fisik	DAK Non Fisik	SELAIN DAK	TOTAL	Literasi	Konservasi	Tangguh Bencana	Stunting	Inflasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>KEPEGAWAIAN</b>									
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			17.839.000	17.839.000					
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.705.000	2.705.000					
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.705.000	2.705.000					
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.166.000	2.166.000					
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			2.320.000	2.320.000					
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.000.000	1.000.000					
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.999.800	4.999.800					
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.301.975.200	2.301.975.200					
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.600.000	2.600.000					
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			1.000.000	1.000.000					
2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2.000.000	2.000.000					
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									
3.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			2.865.000	2.865.000					
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			30.000.000	30.000.000					

No	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Sumberdana						Dukungan Subkegiatan Terhadap Program Prioritas Kabupaten		
		Komitmen Daerah						Prioritas Nasional		
		DAK Fisik	DAK Non Fisik	SELAIN DAK	TOTAL	Literasi	Konservasi	Tangguh Bencana	Stunting	Inflasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.501.000	2.501.000					
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			33.478.000	33.478.000					
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.294.000	15.294.000					
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.960.000	3.960.000					
4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu			6.543.000	6.543.000					
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			182.123.000	182.123.000					
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
5.1	Pengadaan Mebel			11.300.000	11.300.000					
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			191.880.265	191.880.265					
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.040.000	3.040.000					
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			30.695.000	30.695.000					
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			20.362.600	20.362.600					
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			44.150.000	44.150.000					
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.160.000	10.160.000					
7.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			83.300.000	83.300.000					







No	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Sumberdana					Dukungan Subkegiatan Terhadap Program Prioritas Kabupaten					
		DAK Fisik		DAK Non Fisik		TOTAL	Komitmen Daerah		Prioritas Nasional			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	2											
4	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>											
4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			321.863.000		321.863.000						
4.2	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			49.622.000		49.622.000						
4.3	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			5.152.000		5.152.000						
4.4	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			23.134.000		23.134.000						
4.5	Pembinaan Disiplin ASN			24.691.000		24.691.000						
4.6	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			35.852.500		35.852.500						
	<b>TOTAL</b>	-	-	<b>5.237.644.365</b>	-	<b>5.237.644.365</b>						